

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DENGAN CARA
MEMBAKAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 16/Pid.B/2017/PN.Trg)**

SKRIPSI

Oleh :

Askiyatul Qusna

(C93215047)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Askiyatul Qusna
NIM : C93215047
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Pengrusakan Dengan
Cara Membakar Perspektif Hukum Pidana Dan
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nommor:
16/Pid.B/2017/Pn.Trg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 juli 2019

Saya yang menyatakan



Askiyatul Qusna
NIM. C93215047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Askiyatul Qusna NIM. C93215047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 April 2019

Pembimbing Skripsi,



Nurul Asiya Nadhifa, M.HI.
NIP. 19750423200312200

PENGESAHAN

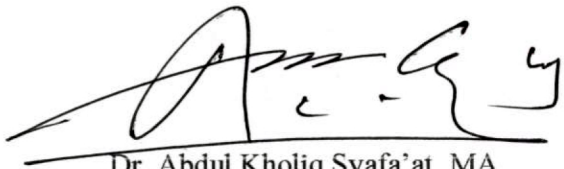
Skripsi yang ditulis oleh Askiyatul Qusna NIM. C93215047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001


Penguji II,


Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III,


Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,


Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Askiyatul Qusna
NIM : C93215047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Askiyakisya8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGUSAKAN DENGAN CARA MEMBAKAR
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA POSITIF (STUDI PUTUSAN

NOMOR: 16/Pid.B/2017/PN.Trgr

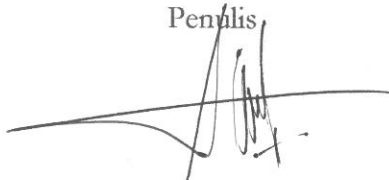
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2019

Penulis


(Askiyatul Qusna)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pengrusakan Dengan Cara Membakar Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Trg)” ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pembuktian tindak pidana pengrusakan dari perspektif hukum pidana, (2) menganalisis pembuktian tindak pidana pengrusakan dari perspektif hukum pidana islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan negeri tenggarong yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana pengrusakan dengan cara membakar. Terdakwa di jerat dengan pasal 406 ayat (1) KUHP tentang pengrusakan dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan penjara. Sesungguhnya fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran lahan untuk membuka perkebunan yang diatur dalam pasal 108 UU RI Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dan asas *lex specialis derogate legi generalis* menyatakan bahwa jika perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum dan juga pidana khusus maka yang khusus itulah yang diterapkan. Dari analisis penerapan hukum acara pidana majelis hakim lebih condong menggunakan teori pembuktian *convention in time* sehingga keyakinan hakim sangat kuat pengaruhnya terhadap putusan. Dalam hukum acara pidana islam alat bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah iqrar (pengakuan) dan syahadah (kesaksian), dan qarinah (petunjuk).

Sejalan dengan hal tersebut maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum khususnya para hakim agar senantiasa berpaku kepada teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP serta Undang-undang yang berlaku, agar dalam penerapannya memberikan suatu kepastian hukum.

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| | Halaman |
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 7 |
| C. Batasan Masalah | 7 |
| D. Rumusan Masalah..... | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| G. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 11 |
| H. Definisi Operasional | 12 |
| I. Metode Penelitian | 13 |
| J. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM | 17 |
| A. Pembuktian Dalam Hukum Positif Di Indonesia | 17 |
| 1. Pengertian Pembuktian..... | 17 |
| 2. Beban Pembuktian Menurut KUHAP | 19 |
| 3. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP | 24 |
| 4. Alat Bukti | 26 |

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pengrusakan Dengan Cara Membakar Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Trgr)” ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pembuktian tindak pidana pengrusakan dari perspektif hukum pidana, (2) menganalisis pembuktian tindak pidana pengrusakan dari perspektif hukum pidana islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan negeri tenggarong yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana pengrusakan dengan cara membakar. Terdakwa di jerat dengan pasal 406 ayat (1) KUHP tentang pengrusakan dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan penjara. Sesungguhnya fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran lahan untuk membuka perkebunan yang diatur dalam pasal 108 UU RI Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dan asas *lex specialis derogate legi generalis* menyatakan bahwa jika perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum dan juga pidana khusus maka yang khusus itulah yang diterapkan. Dari analisis penerapan hukum acara pidana majelis hakim lebih condong menggunakan teori pembuktian *convention in time* sehingga keyakinan hakim sangat kuat pengaruhnya terhadap putusan. Dalam hukum acara pidana islam alat bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah iqrar (pengakuan) dan syahadah (kesaksian), dan qarinah (petunjuk).

Sejalan dengan hal tersebut maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum khususnya para hakim agar senantiasa berpaku kepada teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP serta Undang-undang yang berlaku, agar dalam penerapannya memberikan suatu kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun didalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama, tolong menolong, bantu membantu, untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dengan sadar atau tidak manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana yang harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum.¹

Menurut Soedarta hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan, jika sarana lain tidak memadai maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsidair. Pidana termasuk juga tindakan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979), 31-32.

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya, selain itu barang yang telah dirusak merupakan suatu yang bernilai bagi pemiliknya dengan perusakan barang sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Penghancuran dan pengrusakan yang sering kali terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya sehingga dalam hal ini Undang-undang atau aturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan

³ Ibid., 13

Pada kasus pengrusakan pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan pasal 406 KUHP seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.⁴

1. Barang siapa (menunjuk pelaku, minimal pelaku yang diduga melakukan perusakan).
2. Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum (tanpa izin merusak tanaman/pohon/bangunan/pagar milik orang lain).
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai/ menghilangkan barang tertentu.
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyiapkan lahan. Kalau dengan api siapapun yang bekerja bisa suruhan atau siapapun dengan bahan bakar sedikit bisa bersih.

Pembakaran ialah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Kebakaran lahan pertama-tama merusak vegetasi, kerusakan vegetasi kemudian merusak kehidupan margasatwa dan secara tidak langsung merusak tanah yang berasosiasi dengan vegetasi dan hidrologi.⁵

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan⁶. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Hukum positif Indonesia telah mengatur secara khusus tindak pidana pembakaran lahan. Aturan tersebut diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.

⁵KRMT Tejoyuwono Notohadinegoro, “*Pembakaran dan Kebakaran Lahan*”: <http://faperta.ugm.ac.id/download/publikasidosen/tejoyuwono> diakses 4 april 2019

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁷ (QS. Al-Rum:41)

Selain hukuman materiil yang begitu kompleks sebagaimana dijelaskan diatas. Peranan penegak hukum juga sangat berpengaruh terhadap tegaknya keadilan di masyarakat. Proses peradilan yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana menjadi rambu-rambu bagi majelis hakim untuk menyelesaikan permasalahan di persidangan.⁸

Salah satu yang menjadi bagian penting dalam persidangan adalah pembuktian. Melalui pembuktian ini akan ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan dibebaskan. Tetapi apabila hasil pembuktian menyatakan terdakwa bersalah maka terdakwa akan dijatuhi hukuman.

⁸ Bagus, Moh. “*Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur* (Studi Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Namun hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 16/Pid.B/2017/PN Trg. Bahwa Muhammad Ali bin Masri diputus dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan.¹¹

Padahal seharusnya hakim lebih menggunakan pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang merupakan dakwaan kedua jaksa penuntut umum.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin memberikan suatu konsep tentang penelitian yang berkenaan dengan **“Pembuktian Tindak Pidana**

¹⁰ Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[illegible]

1. Identifikasi Masalah

a. Deskripsi kasus tindak pidana pengrusakan dengan cara membakar dalam Studi Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Trg.

c. Pembuktian dalam tindak pidana pengrusakan dengan cara membakar menurut perspektif hukum pidana dalam putusan nomor: 16/Pid.B/2017/PN.Trg.

d. Pembuktian dalam tindak pidana pengrusakan dengan cara membakar menurut perspektif hukum pidana islam dalam putusan nomor: 16/Pid.B/2017/PN.Trg.

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:

- ¹² Aini kholison zuhrufal, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 718/PID.B/206/PN.RAP tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Kebakaran yang Menyebabkan Kerusakan pada Barang*”. (Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018)

[illegible]

4. Rusli (2018), Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl) UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menyatakan bahwa sanksi pidana yang di jatuhkan terlalu ringan dan kurang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk kepada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tapi hakim malah menggunakan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2013 dengan hukuman penjara 4 bulan dan denda 500.000. Tinjauan hukum islam dalam putusan ini menggunakan takzir¹⁵.

Telah banyak yang membahas tentang pengrusakan dengan membakar lahan skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis diatas sangatlah berbeda

¹⁵Rusli, "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/PID.SUS/2015/PN.BKL), (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pengrusakan dengan cara membakar dalam perspektif hukum pidana positif dalam Putusan Nomor: 16/Pid.B/2017/PN.Trg.
2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pengrusakan dengan cara membakar dalam perspektif hukum pidana positif dalam Putusan Nomor: 16/Pid.B/2017/PN.Trg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Segi Teoritis, dapat dijadikan sebagai sumbangan penyuluhan hukum yang baik dan dijadikan bahan kajian mahasiswa, atau berfungsi sebagai tambahan literatur perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 5) Departemen Agama RI Al Quran Terjemah Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan penelitian pustaka yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisis sumber pustaka kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting dan menempatkan data tersebut sesuai dengan sistematika pembahasannya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan terkumpul kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing*: menyusun data yang berkaitan dengan pengrusakan dengan cara membakar lahan.
- b. *Organizing*: meyusun data yang berkaitan dengan pengrusakan dengan cara membakar lahan secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c. *Analyzing*: melakukan analisis terhadap kasus pengrusakan dengan cara mebakar dengan menggunakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana islam atau dalil yang nantinya dapat menjadi kesimpulan jawaban terkait permasalahan yang telah di rumuskan.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Pembuktian Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktian. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti terjemahan dari Bahasa Belanda *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. dalam Kamus Hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan pada hakim bagi penilaiannya.¹

¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2012), 3

Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang di benarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai:

- Macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum
- Sistem yang dianut dalam pembuktian
- Syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta

² Aristo M.A. Pangaribuan Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), 273

d. Kewenangan hakim untuk menerima menolak dan menilai suatu pembuktian.

2. Beban pembuktian menurut KUHAP

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan bilamana kekuatan pembuktian tersebut dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian.³

a. *Conviction in time* (keyakinan pada waktunya)

Sistem pembuktian tersebut adalah sistem yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Alat bukti dapat saja diabaikan olehnya dan menarik kesimpulan dari keterangan terdakwa. Kelemahan sistem ini adalah putusan hakim berdasarkan pada keyakinan belaka dapat menentukan putusan kepada terdakwa dari tindak pidana secara bebas tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, meski kesalahan terdakwa telah terbukti. Bila bertumpu pada keyakinan semata-mata tanpa didukung alat bukti yang sah, maka telah cukup

³ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 49

Bertolak pangkal seperti itulah teori berdasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri lalu ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang⁴.

Sistem ini dikenal juga sebagai sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukkungan dan alasan yang jelas. Hakim berkewajiban untuk menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya yang dapat diterima secara

[illegible]

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang akan diajukan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim. Penilaian itu adalah wajar. Oleh sebab itu hakim harus berfikir logis berusaha untuk menjelaskan dan memberikan arti mengenai sejumlah gejala yang mereka jumpai yakni dengan cara menghubungkan secara timbal balik dari gejala yang satu

[illegible]

Pembuktian tersebut adalah suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata-mata (*conviction in time*). Keyakinan hakim tidak berarti berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tapi tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya seolah-olah dia adalah robot dari pelaksanaan Undang-Undang yang tidak berhati nurani. Kelebihan sistem ini adalah hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dari berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang. Dengan demikian hakim dapat mengenyampingkan faktor keyakinan semata-mata dan menegaskan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas sejak awal persidangan. Sistem ini lebih pantas disebut sebagai penghukuman berdasar hukum.

[illegible]

Sistem pembuktian menurut *positief wettelijk* adalah tersedianya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang akan memaksa hakim untuk menyatakan suatu dakwaan sebagai bukti yang sah.⁷

Menurut ajaran ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penetapan

[illegible]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat 4 (empat) teori atau sistem pembuktian maka untuk mengetahui sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP kita dapat merujuk Kepada ketentuan pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan tersebut diatas merupakan serapan dari ketentuan pasal 294 ayat (2) HIR berikut kutipannya:

[illegible]

Sistem pembuktian sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 183 KUHAP diatas, masih sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Rancangan KUHAP untuk lebih jelasnya dbawah ini adalah kutipan ketentuan di dalam rancangan KUHAP mengenai sistem pembuktian. Pasal 174 Rancangan KUHAP

“hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana indonesia KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dengan dasar

teori ini hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 alat bukti yang sah.⁹

4. Alat bukti

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP tidak menggunakan angka 1 sampai 5 tapi melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti. Secara eksplisit pasal 184 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut.

Alat bukti yang sah ialah:¹⁰

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Ulasan berikut ini terkait alat bukti yang sah menurut KUHP:

- a. Keterangan saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

⁹ Ibid 282

Konstruksi pasal 1 angka 26 juncto pasal 1 angka 27 juncto pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara a contrario, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau alami sendiri bukanlah keterangan saksi. Definisi saksi yang demikian merugikan tersangka atau terdakwa bilamana ia memiliki saksi alibi karna saksi alibi yang dibutuhkan sebagai keterangan yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa sudah tentu ia tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri mengenai perkara pidana yang disangkakan atau didakwakan. Tegasnya saksi alibi tidak termasuk dalam definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 26 juncto pasal 1 angka 27 juncto pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Pada

[illegible]

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukanlah merupakan keterangan saksi, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.¹³

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terus terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010),

5

¹³ Ibid 105

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat adan alat bukti keterangan ahli.¹⁴

c. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah

¹⁴ Ibid 106

Ketiga, surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain.

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian.
Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- 2) Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- 3) Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- 4) Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum

[illegible]

pembuktian yang di abstraksi dari pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal sua alat bukti yang sah.¹⁶

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*.

KUHAP memberikan definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- 2) Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- 3) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang di periksa.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*Al-bayyinah*” yang artinya “suatu yang menjelaskan”. Ibn Al-Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq Al Hukmiyah* mengartikan “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil-dalil hingga meyakinkan.¹⁷

[illegible]

- a. *Yaqīn* ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.
- b. *Zān* (sangka kuat) ialah lebih kuat kepada membenarkan dalam suatu hal yang kita ragukan.
- c. *Shubhat* ialah sesuatu yang berdiri diantara ada dengan tidak ada, sama beratnya tidak dapat dikuatkan salah satunya.
- d. *Wahm* ialah merupakan persangkaan yang sangat lemah, yang lebih condong tidak pernah terjadi.

Alat bukti menurut Ibnu Qayyim adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan/gugatan. Ia telah menemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) alat bukti yang disebutkan dalam kitabnya “*at thuruqul hukmiah*” yang disimpulkan dari Al quran, hadis yang shahih, atau dari praktek-praktek Nabi SAW.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997), 129

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ

[illegible]

“dari nafi’, ibnu umar, bahwa sesungguhnya rasulullah saw. Pernah menegmbalikan sumpah kepada penggugat hak” (h.r. daraquthni).

إِذَا نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدِّ عِي

“apabila ia (tergugat dan tertuduh) menolak (sumpah) maka kembalikanlah sumpah itu kepada penggugat/penuntut.”

- f. Sumpah. Sumpah ini dihadapkan kepada penggugat/penuntut apabila ternyata tidak dapat membuktikan atas gugatan atau tuduhannya yang ternyata diingkari oleh tergugat/tertuduh.
- g. Saksi. Saksi dapat terwujud dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.
- h. Penolakan (sumpah) dan seorang saksi (laki-laki). Dapat dicontohkan di sini, bahwa rasulullah saw bersabda:

إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَبَاءَ تَ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدِلَ أُسْتُخْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فُنُكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَحَارَ طَلَاؤُهُ

“Apabila seorang perempuan mengaku telah dicerai suaminya, lalu datang (menghadap hakim) dengan membawa seorang saksi yang adil maka suaminya harus diminta sumpahnya, kemudian jika suami mau bersumpah maka batallah kesaksia seorang saksi tadi, dan jika suami tersebut menolak maka penolakannya itu berkedudukan sebagai seorang saksi yang lain, dan tertalakhlah perempuan itu.”

- i. Dua saksi perempuan dan sumpahnya penggugat. Alat bukti ini untuk gugatan harta benda dan hak-hak perdata yang berkaitan dengan itu.
- j. Saksi yang terdiri dari anak-anak yang telah mengerti. Saksi yang terdiri dari anak-anak yang telah mengerti (*mumayyiz*) ini menurut Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan salah satu dari pendapat kalangan Mazhab

- Iqar (pengakuan)
- Syahadah (kesaksian)
- Yamin (sumpah)
- Nukul (menolak sumpah)
- Qasamah (bersumpah 50 orang)
- Keyakinan hakim
- Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan

Dalam pada itu alat-alat pembuktian yang terpokok atau hujjah-hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam soal gugat menggugat hanya ada tiga saja yaitu:²¹

- a. Iqrar (pengakuan)
- b. Syahadah (kesaksian)
- c. Yamin (sumpah)

Berikut penjelasan mengenai macam-macam alat bukti:

1) Pengakuan (iqrar)

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997), 136

²¹ Ibid 137

- a. Baligh : dewasa
- b. Aqil : berakal/waras, tidak gila
- c. Rasyid : punya kecakapan bertindak

- Lisan
- Isyarat, kecuali dalam perkara zina
- tertulis

Dan pada pasal 408 undang-undang perdata menentukan bahwa yang dimaksud pengakuan yaitu:²⁴

اعْتَرَفُ الْخَصْمَ أَمَامَ الْقَضَاءِ بِوَاقِعَةِ مُدْعَا بِهَا عَلَيْهِ

²⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam....*, 118

Dan terjadinya pengakuan itu adalah ditengah-tengah proses pemeriksaan gugatan/tuduhan yang berkenaan dengan peristiwa ini. Pengakuan (iqrar) adalah hujjah yang paling kuat, untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang yang di bawah pengakuan (curatele) oleh karenanya pengakuan orang-orang yang dipaksa, anak kecil, orang gila, dan sebagainya tidaklah dianggap sah. Walaupun pengakuan ini dipandang sebagai hujjah yang paling kuat, namun terbatas hanya mengenai diri si yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Demikian dalam garis besarnya berbeda dengan kesaksian. Kesaksian itu mengenai orang lain karenanya para fuqaha mengemukakan satu kaidah yaitu:²⁵

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ وَالْإِقْرَأْ رُحَّةٌ قَاصِرَةٌ

2) Kesaksian (baiyyinah syakhshiyah)

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997), 137

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.²⁷

- Muslim
- sehat akal
- baligh
- tidak fasik

- a. islam
- b. adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta)
- c. baligh

²⁸ Ibid 140

- yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara
- mahram
- yang berpentingan atas perkara itu
- sakit jiwa
- fasik (yaitu orang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah)
- safih (yang lemah akal atau dibawah pengampunan).

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Sumpah menurut bahasa hukum islam disebut al-yamin atau al-hilf tetapi kata al-yamin lebih umum dipakai. Menurut hadits rasulullah sebagaimana telah diterangkan dimuka, pihak yang

Qasamah juga merupakan suatu jalan untuk memutuskan suatu perkara dengan mewajibkan diyat atas yang dituduh diberikan kepada wali yang terbunuh. Jalan ini dibenarkan oleh sunnah apabila didapati seseorang telah mati terbunuh di sesuatu tempat tetapi tidak diketahui pembunuhnya, maka apabila wali-wali si terbunuh menuntut bela dengan cara qasamah, dan cukup pula syarat-syarat qasamah itu haruslah permintaannya itu dikabulkan. Disuruh 50 orang dari penduduk kampung dimana jenazah itu ditemukan yang ditunjuk wali-wali si terbunuh lalu masing-masing mereka bersumpah, tidak membunuh dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya sesudah mereka bersumpah maka dipungutlah diyat dan mereka untuk diberikan kepada wali si terbunuh. Demikianlah menurut mazhab hanafiyah yakni yang disuruh bersumpah itu adalah orang yang tergugat.³²

Ilmu (keyakinan) hakim yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan rapat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu

³² Ibid 162

Identitas terdakwa

Kasus pengrusakan dengan cara membakar yang terjadi di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Perkara Nomor Register 16/Pid.B/2017/PN.Trng. Terdakwa lahir Tenggarong pada tanggal 26 juli 1972 dan berusia 44 tahun. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Long Apari Rt 007 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kasus posisi

B. Kasus posisi

Terdakwa pada hari kamis tanggal 27 agustus 2015 sekira jam 10.00 wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan september tahun dua ribu lima belas bertempat di areal Revegetasi PT Tanito Harum Spontan Baru, RT.40 Ds. Spontan Baru, Kec. Tenggaraong. Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggaraong “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai

atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Berawal ketika terdakwa mendengar dari orang-orang dikampung bahwa ada kelompok tani singkong gajah dan sudah dibuat pabriknya di desa bendang raya kemudian terdakwa juga mau ikut menanam singkong gajah namun terdakwa tidak mempunyai lahan, kemudian terdakwa mencari lahan yaitu Lahan Reklamasi dan Revegetasi PT Tanito Harum kemudian terdakwa membersihkan semak-semak di lahan PT Tanito Harum atau belukarnya dirintis dengan cara menebasi dengan parang, lalu terdakwa membakar sekitaran pohon sengon dan akasia kemudian kalau ada pohon sengon dan pohon akasia sudah mati maka terdakwa bakari lagi di bawahnya, selanjutnya setelah pohonnya mati dan lokasinya sudah bersih maka terdakwa menanami pohon singkong gajah di lokasi tersebut. Terdakwa juga memotong pohon-pohon yang sudah mati untuk membikin pondok dengan menggunakan gergaji kemudian pasang terpal di atasnya untuk berteduh.

Sebelum terdakwa melakukan penebangan dan pembakaran terhadap tanaman reklamasi berupa pohon sengon dan pohon akasia yang ada di lahan Reklamasi dan Revegetasi PT Tanito Harum pohon sengon dan pohon akasia tumbuh subur walaupun banyak belukarnya namun setelah terdakwa melakukan penebangan dan pembakaran terhadap tanaman reklamsi berupa pohon sengon dan pohon akasia yang ada di lahan Reklamasi dan Revegetasi PT Tanito Harum pohon sengon dan pohon akasia sudah mati dan tidak bisa

C. Keterangan saksi

Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. saksi bekerja di PT Tanito Harum sejak bulan maret 2005 dan jabatan saksi adalah Pjs. Kabag Lingkungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah dengan berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yang meliputi pengelolaan air limbah, pemantauan pelaksanaan reklamasi dan revegetasi. Pt Tanito Harum adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Pengrusakan yang saksi maksudkan tersebut adalah pengrusakan tanaman Revegetasi PT Tanito Harum yang merupakan tanaman pasca tambang setelah lahan di Reklamasi.

[illegible]

Tanito Harum Spontan Baru RT 40 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan pengrusakan terhadap tanaman Revegetasi tersebut adalah perbuatan terdakwa.

Saksi bisa mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan tanaman Revegetasi PT Tanito Harum adalah terdakwa memang saksi mengetahui secara langsung lokasi yang mana pada saat itu terdakwa sedang melakukan penebangan dan pembakaran terhadap tanaman revegetasi kemudian saksi menghampiri dan menegur untuk tidak melakukan penebangan dan pembakaran dan sekaligus menanyakan identitas yang bersangkutan yang saat itu mengaku namanya terdakwa. Dan pada waktu itu yang bersangkutan mengaku tinggal di spontan baru hanya saja tidak lengkap secara detail.

Saksi lihat pada waktu itu terdakwa melakukan pengrusakan tanaman revegetasi dengan cara ditebang dengan menggunakan parang dan setelah itu tanaman yang sudah roboh dibakar sebanyak kurang lebih 50 pohon dengan luas lahan kurang lebih 2 (dua) hektar. Tanaman tersebut berupa tanaman akasia, sengon, meranti, kapur, dan ulin. Untuk tanaman revegetasi yang ditebangi terdakwa itu ditanam sejak tahun 2009 dengan bukti-bukti peta dan bukti pendukung terkait berupa buku catatan kegiatan penanaman, laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanda terima penyampaian pelaporan, surat tanah/pembebasan.

Kondisi tanaman sebelum ditebangi dan dirusak tanamannya masih tegak berdiri dan keadaan sehat, rimbun dan terawat dan kondisi tanaman

Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Pada pertengahan bulan agustus 2015 ada laporan dari warga mengenai orang-orang yang melakukan pengrusakan, pembakaran, dan menempati lahan di areal Revegetasi PT Tanito Harum di daerah Blok Sukodadi yang masuk dalam wilayah administrasi RT 40 Dusun Spontan Baru Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan laporan tersebut maka pada tanggal 27 agustus 2015 saksi bersama dengan tim dari PT Tanito Harum dalam hal ini saksi dan Sdr. Agus Hadi Susilo bersama Ketua RT 40 Dusun Spontan Baru Saksi Jemmy Goni bin Welly juga dari Babin Kamtibmas Kelurahan Loa Ipuh serta Babinsa Kelurahan Loa Ipuh dan bersama 2 (dua) orang staff pemerintahan Kelurahan Loa Ipuh untuk melakukan menindak lanjuti laporan dari warga RT 40 tentang adanya perusakan, pembakaran dan pendudukan lahan di areal Reklamasi dan Revegetasi PT Tanito Harum dan dari hasil peninjauan di lapangan diketemukan sisa-sisa pembakaran tanaman revegetasi dan adanya perintisan lahan serta pematokan lahan namun pada saat dilakukan peninjauan

lapangan tidak diketahui atau diketemukan pelaku atau warga yang melakukan aktifitas.

Bahwa kejadiannya sejak tanggal 27 agustus 2015 sampai dengan hari ini bahkan lokasinya sudah dibangun pondok dan ditanami singkong. PT Tanito Harum pemegang PKP2B yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Dan sepengetahuan saksi bahwa ada warga lain yang terlibat dalam kegiatan perintisan dan pembakaran yaitu sekitar 20 (dua puluh) orang lebih namun untuk lebih jelasnya yang mengetahui secara pasti di bidang lingkungan adalah saksi Sugiharto. Usia tanaman-tanaman reklamasi atau tanaman revegtasi usia tanam tahun 2017 sampai dengan 2009 terkait jumlah tanaman yang rusak saksi tidak mengetahuinya

Bahwa yang melakukan penanaman revegetasi adalah di bawah naungan departemen lingkungan pt tanito harum dan sekaligus sebagai penanggung jawab dalam penanaman maupun perawatan adalah di bagian departemen lingkungan pt tanito harum

Bahwa terdakwa dalam perintisan, pembakaran dan pendudukan lahan tanpa ada ijin dari PT Tanito Harum sehingga dengan adanya kejadian tersebut dilaporkan pihak berwajib dan peralatan yang digunakan adalah parang chainsaw dengan cara semak-semak/ belukarnya dirintis dengan cara menebasi dengan parang kemudian memotong pohon sengon dan pohon akasia milik pt tanito harum lalu setelah itu dilakukan pembakaran dan selanjutnya dibangun pondok dibagian pinggir jalan dengan menggunakan

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita pt tanito harum akibat perbuatan terdakwa karna yang mengetahui hal tersebut adalah bagian eksternal lingkungan.

Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga. Saksi lihat tanaman reklamasi milik PT Tanito Harum dilokasi yang dilakukan perintisan adalah berupa tanaman sengon dengan lebar diameter sekitar 30 cm. Kejadiannya mulai diketahui sejak tanggal 27 agustus 2015 sampai dengan hari ini dan bahkan lokasinya saat ini sudah dibangun pondok dan juga ditanami singkong.

[illegible]

Loa Ipuh dan saksi sendiri selaku Ketua RT 40 tersebut yang mana dalam permasalahan ini walnya para pelaku yang melakukan perintisan dilakukan diwilayah saksi yaitu RT 40 Desa Spontan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian saksi usir dan akhirnya para pelaku pindah dan merintis lahan/merusak tanaman Reklamasi PT Tanito Harum.

Bentuk kegiatan perintisan lahan adalah melakukan penebangan tanaman reklamasi berupa pohon sengon dan pohon akasia dengan menggunakan alat mesin chainsaw lalu setelah pohon rebah dilakukan pembakaran hingga lahan terlihat bersih dan sekarang sudah dibangun pondok dan ditanami singkong. Alat yang digunakan adalah mesin chainsaw, parang serta alat peralatan lain untuk membuat pondok.

Caranya adalah semak-semak/belukarnya dirintis dengan cara menebasi dengan parang kemudian dipotong pohon sengon dan pohon akasia milik pt tanito harum lalu setelah itu dilakukan pembakaran dan selanjutnya dibangun pondok dibagian pinggir jalan dengan menggunakan kayu balok berupa kayu sengon yang telah dipotong dengan chainsaw.

Keadaan tanaman reklamasi berupa tanaman sengon sebelum saksi lakukan perintisan dalam keadaan hidup dan tumbuh dengan subur tapi disekitarnya masih banyak belukarnya. Keadaan tanaman reklamasi berupa tanaman sengon dan akasia milik PT Tanito Harum sekarang sudah mati dan sudah tidak bisa hidup lagi karena sudah dibakar. Ynag melakukan adalah diantaranya terdakwa dan Sdr. RIMBA JAYA serta masih banyak lagi yaitu sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya tetapi saksi tidak kenal.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu merintis lahan dengan cara menebasi dengan parang kemudian memotong pohon sengon dan pohon akasia milik PT Tanito Harum lalu setelah itu dilakukan pembakaran dan selanjutnya dibangun pondok bagian pinggir jalan dengan menggunakan kayu balok berupa kayu sengonyang telah dipotong dengan chainsaw, kemudian dilakukan penanaman singkong dan pada saat itu terdakwa waktu saksi larang atau saksi tegur dengan kata-kata “..ini siapa yang merintis ini..” dijawab “..saya tidak kerja disini..ini tidak apa-apa saya ini ikut program singkong gajah..” setelah itu terdakwa menelpon dan tiba-tiba banyak orang yang berdatangan akhirnya dari pada ribut maka saksi suruh membubarkan diri saja.

Menurut saksi bahwa kelompok terdakwa dan kawan-kawannya sudah mengetahui kalau yang dirintis dan ditebangi adalah tanaman Reklamasi milik PT Tanito Harum karena sudah jelas disekitaran lokasi tersebut banyak plang tanaman reklamasi pt tanito harum disamping itu sebelum sudah dilakukan rapat bersama oleh pihak PT Tanito Harum yang diwakili oleh Sdr. CECEP, kepala desa bandang raya selaku yang mengkoordinir tanaman singkong gajah dengan beberapa ketua RT sekitar selanjutnya hasil rapat bahwa pihak pt tanito harum mengizinkan pinjam pakai lahan tetapi harus dibawah koordinir dari kepala desa bandang raya khusus penanaman singkong gajah dengan catatan dilarang merusak tanaman reklamasi pt tanito harum seperti pohon sengon dan pohon akasia dan pelaksanaan awal adalah merintis secara gotong royong bersama-sama diawasi oleh korlap.

Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi ketahui bahwa PT Tanito Harum adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara yang terletak di pondok labu atau kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara. Saksi hanya mengetahui bahwa PT Tanito Harum sudah ada melakukan kegiatan reklamasi atau revegetasi tetapi saksi tidak mengetahui kapan penanaman pohon untuk reklamasi atau revegetasi tersebut. Saksi ketahui lokasi areal reklamasi atau revegetasi pt tanito harum adalah tanaman akasia, sengon, gamelyna, lamtoro, gamal, meranti, ulin dll yang saksi tidak ketahui namanya.

[illegible]

5. Alfonsius sarta

[illegible]

Yang saksi lihat di lokasi areal reklamasi atau revegetasi pt tanito harum adalah tanaman akasia, sengon, gamelyna, lamtoro, gamal, meranti, ulin dll yang saksi tidak ketahui namanya. Saksi mengetahui tentang hal tersebut karena memang saksi sering lewat atau memang jalur saksi melewati kebun saksi yang berada di pondok labu dan spontan dan selain itu di lokasi tersebut juga dipasang papan bahwa lokasi adalah areal reklamasi dan juga dipasang baliho peringatan oleh pt tanito harum yang menjelaskan dilarang menebang, berkebun, membakar, dan menduduki areal reklamasi dan revegetasi pt tanito harum.

Saksi mengetahui kejadian pengerusakan tanaman revegetasi atau reklamasi PT Tanito Harum tersebut yaitu sekitar bulan agustus 2015 di areal reklamasi atau revegetasi PT Tanito Harum Spontan Baru RT 40 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Saksi mengetahui yang melakukan pengerusakan tersebut adalah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang saksi yang tidak diketahui namanya. Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut terdakwa karena saksi pernah bersama-sama dalam kelompok singkong gajah dan karena pada saat itu terdakwa melihat dalam melakukan perintisan mulai masuk areal reklamasi dan revegetasi pt tanito harum maka saksi langsung keluar dari kelompok tersebut karena saksi takut terjerat hukum disebabkan oleh tindakan terdakwa yang masuk dan melakukan perintisan tanaman reklamasi atau revegetasi pt tanito harum.

Terdakwa melakukan perintisan lahan dilokasi reklamasi pt tanito harum yang dilakukan sendiri dengan dibantu oleh keluarga terdakwa dan kadang dibantu secara bersama-sama oleh teman terdakwa yang lainnya. Terdakwa lihat tanaman reklamasi milik pt tanito harum dilokasi yang terdakwa lakukan perintisan adalah berupa tanaman sengon dan akasia dengan lebar diameter sekitar 30 cm.

[illegible]

terdakwa gunakan untuk melakukan pembersih atau perintisan di areal tanaman reklamasi adalah dengan menggunakan parang kemudian kalau alat yang terdakwa gunakan membikin pondok disekitaran lokasi yang terdakwa rintis adalah gergaji, paku, dan palu.

Cara terdakwa melakukan perbuatan perintisan lahan/pengrusakan tanaman reklamasi yaitu menebasi pohon yang mau mati dengan parang lalu terdakwa membakar semak disekitaran pohon sengon dan pohon akasia lalu kalau ada pohon sengon dan akasia yang mau mati maka terdakwa bakar lagi bawahnya selanjutnya setelah lokasinya bersih maka oleh terdakwa tanah tersebut ditanami dengan singkong gajah. Awalnya pada awal tahun 2015 terdakwa mendapatkan informasi dari kepala desa bandang raya bahwa akan ada pertemuan di kantor desa.

Pada saat pertemuan tersebut terjadi ada sekitar 200 (dua ratus) warga yang hadir. Pada pertemuan tersebut ada ajakan dari kepala desa bandang raya untuk menanam singkong gajah. Terdakwa menanam singkong gajah di lahan pt tanito harum atas petunjuk kepala desa bandang raya dan bukan atas petunjuk pt tanito harum. Warga yang ikut menanam singkong gajah mendapatkan lahan $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar. Terdakwa ketika akan menanam singkong gajah ada menebang pohon akasia namun hanya 1 (satu) pohon saja. Terdakwa mengetahui kalau daerah sekitar terdakwa menanam singkong gajah tersebut ada plang yang bertuliskan “AREAL REVEGETASI/REKLAMASI PT TANITO HARUM”.

D. Pertimbangan hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda.
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan.

Bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh penuntut

- Penempatan unsur dengan sengaja dimuka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengan kesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, selain itu diantara 2 unsur terdapat kata “dan” hingga menurut hoge raad kata ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum akan tetapi masing-masing berdiri sendiri dengan demikian meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa penghancuran atau pengrusakan itu melawan hukum maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

[illegible]

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tanggal 27 agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita bertempat di areal revegetasi pt tanito harum yang berada di spontan baru rt 40 desa spontan baru kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara terdakwa telah melakukan perbuatan membersihkan pohon-pohon yang sudah mati dan melakukan menebang pohon akasia sebanyak 1 (satu) pohon yang dilakukan dengan menggunakan parang dengan maksud dan tujuan terdakwa membersihkan lahan tersebut karena terdakwa akan menanam lahan tersebut dengan singkong gajah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa lahan yang akan terdakwa tanami dengan singkong gajah tersebut adalah merupakan lahan reklamasi dan revegetasi pt tanito harum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa lahan yang dibersihkan oleh terdakwa dengan cara membakar semak-semak, membersihkan pohon-pohon yang sudah mati dan melakukan menebangan pohon akasia sebanyak 1 (satu) pohon merupakan areal revegetasi pt tanito harum yang berada di spontan baru rt 40 desa spontan baru kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara.

E. Amar putusan

- [illegible]

Hal-hal yang memberatkan

- ## Hal-hal yang meringankan

- [illegible]

A. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pengrusakan Dengan Cara Membakar
Perspektif Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Trg

Dalam putusan tersebut jelas bahwa terdakwa didakwa dengan putusan alternatif pertama yakni pasal 406 ayat (1) KUHP dan alternatif kedua yakni pasal 108 UU RI NO 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Dan dalam peristiwa ini hakim telah menvonis terdakwa ali dengan pasal alternatif pertama yakni dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua

Meninjau dari pembuktian perbuatan terdakwa merupakan kejahatan tindak pidana khusus (*lex specialis derogate legi generalis*). Hal ini mengacu pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran lahan untuk membuka perkebunan yang diatur dalam Pasal 108 UU RI No 39 Tahun 2014 jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Adapun alat bukti dan barang bukti yang ada dalam persidangan dalam perkara ini adalah :

Saksi bekerja di PT Tanito Harum sejak bulan maret 2005 dan jabatan saksi adalah Pjs. Kabag Lingkungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah dengan berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yang meliputi pengelolaan air limbah, pemantauan pelaksanaan reklamasi dan revegetasi menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan.

Saksi merupakan ketua RT 40 Kelurahan Loa Ipuh yang merupakan lokasi reklamasi PT Tanito Harum, menyatakan bahwa terdakwa benar melakukan pembakaran lahan tersebut.

[illegible]

Berisikan tentang pengakuan terdakwa melakukan tindak pidana pembakaran lahan untuk membuka perkebunan.

Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pid.B/2017/PN.Trg majelis kurang cermat dan kurang teliti dimana dalam pertimbangan-pertimbangannya menitik beratkan salah atau tidaknya berdasarkan keyakinan. Hal ini nampak jelas dalam pertimbangan putusan ini penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim lebih kepada keyakinan hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat bukti yang sah serta barang bukti yang ada dalam persidangan misalnya dalam hal ini alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hal ini mengacu pada keterangan saksi juga pengakuan terdakwa bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu didasari karna keinginannya memiliki perkebunan dengan cara membakar dan menempati lahan areal revegetasi milik PT Tanito Harum yang kemudian terdakwa tanami pohon singkong.

Maka dalam putusan nomor 16/Pid.B/2017/PN.Trg majelis hakim kurang menurut penulis kurang tepat dalam memutus perkara ini berdasarkan undang-undang yang berlaku, majelis hakim lebih condong terhadap keyaninan hakim daripada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Bahwa berdasarkan analisis diatas maka sepatutnya majelis hakim memutus perkara tersebut menggunakan Pasal 108 Undang-undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ketika suatu perkara masuk dalam suatu aturan pidana umum juga pidana khusus maka haruslah yang khusus itulah yang diterapkan.

B. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pengrusakan Dengan Cara Membakar
Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Trg

Pembuktian menurut Ibn Al-Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq Al Hukmiyah* mengartikan “Bayinah” sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Dalam Hukum Islam yang merupakan alat bukti adalah iqrar (pengakuan), Syahadah (kesaksian), Yamin (sumpah), Nukul (menolak sumpah), Qasamah (bersumpah

50 orang), Keyakinan hakim dan Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Dalam perkara ini majelis hakim memutus perkara menggunakan tiga alat bukti yakni iqrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), dan qarinah (petunjuk) maka penulis disini akan mengkaji tiga alat bukti tersebut.

Yang pertama yakni iqrar (pengakuan) adalah perbuatan terdakwa dengan mengakui segala perbuatan yang ia perbuat. Pengakuan (iqrar) adalah hujjah yang paling kuat, untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang yang di bawah paksaan oleh karenanya pengakuan orang-orang yang dipaksa, anak kecil, orang gila, dan sebagainya tidaklah dianggap sah.

Dalam perkara nomor 16/pid.b/2017/pn.trg alat bukti berupa pengakuan terdakwa ini telah sah menurut hukum islam karna dalam pengakuannya terdakwa tidak dipaksa dan dalam keadaan sehat tidak gila.

Yang kedua yakni syahadah (kesaksian) adalah yang pemberian keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. Dengan syarat pemberi kesaksian haruslah muslim, sehat akal, baligh, tidak fasik.

Dalam perkara ini majelis hakim telah mendengarkan persaksian lebih dari 2 (dua) orang laki-laki saksi yakni Sugiharto, S.T. bin sugiman, jemmy

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: “dan persaksianlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”

Yang ketiga yakni qarinah (petunjuk) adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad atau juga bisa diartikan sebagai tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan. Qarinah dalam perkara ini berupa satu batang pohon akasia bekas terbakar yang ditemukan langsung dari kejadian peristiwa itu terjadi.

Dengan demikian pembuktian dalam putusan nomor 16/Pid.B/2017/PN.Trg telah sesuai dengan kriteria pembuktian dalam hukum pidana islam. Namun majelis hakim kurang cermat dan sesuai dalam menjatuhkan putusan karna tidak sesuai dengan pengakuan dan kesaksian yang ada dalam persidangan yang seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan mengenai pembakaran lahan untuk membuka perkebunan bukan dengan putusan tentang pengrusakan seperti dalam putusan nomor 16/Pid.B/2017/PN.Trg.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pembuktian hukum pidana dalam Perkara Pidana Nomor 16/Pid.B/2017/PN.Trg majelis hakim telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam KUHP. Namun jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Muhammad Ali diatur dalam pasal 108 UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan karna sesuai asas *lex specialis derogate legi generalis* dan pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa apabila tindak pidana masuk dalam suatu aturan pidana umum dan pidana khusus haruslah yang khusus itu yang diterapkan.
2. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana islam alat bukti terdiri dari iqrar (pengakuan) dan syahadah (kesaksian), yamin (sumpah), nukul (penolakan sumpah), dan qasamah. Di dalam putusan pengadilan negeri tenggarong dalam perkara nomor 16/Pid.B/2017/PN.Trg ini telah mengajukan alat bukti berupa iqrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), dan qarinah (petunjuk) yang kriterianya sudah sesuai dengan pembuktian menurut hukum islam.

ardjo, Rachmad. *“Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Meulaboh No: 131/Pid.B/2013/PN.Mbo)”*. Skripsi Uin Ampel, Surabaya, 2016.

lla, Syahruman. *“Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang dilakukan Bersama-sama”*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, April, 2018.

di mushlih, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015

b Undang-undang Hukum Pidana.

ang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebu

Offset, 1979.

Offset, 1979.

Offset, 1979.

Offset, 1979.

Offset, 1979.

Offset, 1979.

Offset, 1979.